

Uji plagiasi

by Uji Plagiasi

Submission date: 26-Apr-2023 08:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2075652105

File name: BAYU_20WARDHANA__20ARTIKEL_20TESIS_REV_204.docx (328.19K)

Word count: 6160

Character count: 39375

Strategi Keberhasilan Implementasi Indeks Desa Zakat Melalui Perancangan Sumber Daya Manusia Pada Program Kampung Zakat Kabupaten Sidoarjo

Bayu Wardhana¹⁾, Sigit Hermawan^{*2)}, Hadiah Fitriyah³⁾

¹⁾Program Studi Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

³⁾ Program Studi Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: bayuardhana020@umsida.ac.id, sigithermawan@umsida.ac.id, hadiahfitriyah@umsida.ac.id

Abstract. *The zakat village index can be interpreted as a measuring tool that can be used by zakat managers in knowing the condition of a village whether the village is eligible to be given assistance or not. This research was conducted with the aim of analyzing the successful implementation strategy of the zakat village through the design of human resources in the zakat village program in Sidoarjo Regency. The research method used is interpretive qualitative with data collection through in-depth interviews, focus group discussions and documentation. The data used is primary data with the object of research namely the zakat village program in Sidoarjo Regency. The results of the study found that the zakat village index had not been implemented by the administrators of the zakat village in Sidoarjo Regency. Several obstacles related to the implementation of the zakat village index in zakat villages include limited human resources, administrator competency and workload. To overcome these problems, a solution is needed, namely inter-agency collaboration. Not only that, in implementing the zakat village index, it can also implement employee development including increasing competence, evaluating workload and the role of leaders in implementing the zakat village index in the zakat village program. The implications of this research are expected to create a strategy for designing human resources in the zakat village program in Sidoarjo Regency in terms of implementing the zakat village index.*

Keywords - *Indeks Desa Zakat, Badan Amil Zakat Nasional, Human Resource Competency*

Abstrak. *Indeks desa zakat dapat diartikan sebagai alat ukur yang dapat digunakan oleh pengelola zakat dalam mengetahui keadaan suatu desa apakah desa tersebut layak untuk diberikan bantuan atau tidak. Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa strategi keberhasilan implementasi desa zakat melalui perancangan sumber daya manusia pada program kampung zakat di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif interpretatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, fokus group discussion dan dokumentasi. Adapun data yang digunakan adalah data primer dengan obyek penelitian yakni pada program kampung zakat Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian didapatkan bahwa indeks desa zakat belum diimplementasikan oleh para pengurus kampung zakat Kabupaten Sidoarjo. Beberapa kendala terkait implementasi indeks desa zakat pada kampung zakat diantaranya terbatasnya sumber daya manusia, kompetensi pengurus dan beban pekerjaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan solusi yakni kerjasama antar lembaga. Tidak hanya itu dalam implementasi indeks desa zakat ini juga dapat mengimplementasikan pengembangan karyawan meliputi peningkatan kompetensi, evaluasi beban kerja dan peran pemimpin dalam implementasi indeks desa zakat pada program kampung zakat. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menciptakan strategi perancangan sumber daya manusia pada program kampung zakat di Kabupaten Sidoarjo dalam hal implementasi indeks desa zakat.*

Kata Kunci – *Indeks Desa Zakat, Program Kampung Zakat, Sumber Daya Manusia*

I. PENDAHULUAN

Riset ini dibangun atas dua isu utama, pertama adalah adanya Indeks Desa Zakat (IDZ) sebagai alat ukur pengelolaan zakat yang diciptakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) [1] [2] [3]. Indeks desa zakat sendiri dapat diartikan sebagai alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai suatu keadaan desa yang bertujuan untuk mengetahui apakah desa tersebut layak atau tidak untuk diberikan bantuan zakat [4] [5]. Tidak hanya itu tujuan lain dilakukannya pengukuran indeks desa zakat adalah untuk mengukur sejauh mana perkembangan kesejahteraan desa yang akan diberikan bantuan zakat sehingga dapat diperoleh data yang dapat digunakan dalam menentukan program bantuan zakat yang bersifat produktif bagi para mustahiq [6] [7]. Adanya indeks desa zakat dapat menjadi alternatif solusi bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengatasi permasalahan penyaluran dana zakat yang dikawatirkan tidak tepat sasaran [8] [9]. Isu kedua yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan adalah problematika sumber daya manusia yang terbatas sehingga berdampak pada penyelenggaraan program yang berjalan tidak efektif [10]. Dalam menghadapi problematika terbatasnya sumber daya manusia maka

dibutuhkan manajemen sumber daya manusia agar implementasi indeks desa zakat dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu dalam implementasi indeks desa zakat sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang cukup mengingat dalam indeks desa zakat ini terdapat tiga peran yang harus dilakukan oleh para pengurus program zakat yakni menentukan desa yang layak diberi bantuan dan menjalankan peran intervensi dan advokasi. Untuk mendukung implementasi indeks desa zakat yang baik maka dibutuhkan juga kompetensi amil yang berkompeten.

Indeks desa zakat merupakan alat ukur yang dirumuskan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) yang bertujuan sebagai alat ukur dalam program *Zakat Community Development (ZCD)* yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis Baznas [11] [12]. *Zakat Community Development Patner (ZCD)* merupakan program pemberdayaan bagi kelompok *mustahiq* yang dikembangkan oleh BAZNAS yang menggabungkan dua aspek yakni aspek sosial meliputi pendidikan, kesehatan, advokasi, lingkungan dan lainnya dengan aspek ekonomi yang bersifat komprehensif dimana pendanaan utamanya bersumber dari dana zakat dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan *mustahiq* itu sendiri [13] [14]. Tidak hanya itu implementasi program zakat *community development patner* merupakan program yang memiliki sasaran penerima yakni *mustahiq* yang bertempat tinggal di desa tetapi lebih difokuskan kepada *mustahiq* yang tertinggal dalam hal kesejahteraan, sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas sehari – hari [13] [15] [16]. Sampai saat ini program zakat *community development patner* telah dilaksanakan pada lebih 100 desa di seluruh Indonesia oleh Lembaga Pengelola Zakat di seluruh Indonesia [17] [18]. Program zakat *community development patner* saat ini juga telah diimplementasikan dalam berbagai model program diantaranya adalah program kampung zakat. Program kampung zakat merupakan program sinergitas antara Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat lainnya. Tujuan diselenggarakan program ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat ditingkat desa yang termasuk kedalam 3T [19] [20].

Salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan program kampung zakat adalah Kabupaten Sidoarjo dimana program ini dilaksanakan di Desa Tanjekwagir Kecamatan Krembung. Adapun implementasi program kampung zakat di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan berlandaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis Program Pilot Project Kampung Zakat Tahun 2020. Terdapat dua program yang dilakukan oleh pengurus kampung zakat. Program pertama program bedah rumah kepada dua penerima dan kedua adalah program Pendidikan dengan memberikan bantuan kepada Taman Pendidikan Al – Quran. Dalam implementasi kampung zakat terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh pengurus kampung zakat Kabupaten Sidoarjo. Tahapan tersebut terbagi menjadi lima tahapan yakni tahapan pertama adalah pemetaan dan penentuan desa yang akan diberdayakan. Pada tahapan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari badan kesejahteraan rakyat dan pemerintah desa setempat. Tahapan kedua adalah penggalangan dana dimana dana yang dihimpun berasal dari Unit pengumpul Zakat, Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Setelah dana terkumpul pihak pengurus akan membuat program yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan diimplementasikan pada desa yang telah dipilih.



Gambar 1. Konsep Kampung Zakat Kabupaten Sidoarjo
Sumber : Peneliti

Dari tahapan diatas dapat diketahui bahwa implementasi program kampung zakat di Kabupaten Sidoarjo masih belum sepenuhnya mengimplementasikan pengukuran indeks desa zakat. Terdapat beberapa tahapan yang belum mengimplementasikan indeks desa zakat, pertama pada tahapan penetapan desa masih belum mengimplementasikan indeks desa zakat. Dalam menetapkan dan menentukan desa yang layak dibantu pengurus kampung zakat mempunyai konsep penentuan tersendiri yakni dengan berdasarkan saran dari badan kesra dan pemerintah desa sehingga didapati bahwa implementasi indeks desa zakat pada tahapan pengukuran dan penentuan belum dilakukan pada program kampung zakat. Kedua tahapan implementasi program belum sepenuhnya menjalankan peran intervensi dan advokasi. Oleh karenanya perlu menjadi perhatian bagi pengurus kampung zakat Kabupaten Sidoarjo dikarenakan pengukuran dan penilaian dalam menentukan desa yang layak diberdayakan sangat

diperlukan. dalam implementasi program ini dikarenakan bertujuan untuk menentukan komunitas yang tepat untuk diberikan bantuan program ini [21] [22]. Implementasi indeks desa zakat juga akan memberikan pandangan program apa yang perlu diberikan kepada masyarakat mengingat program pemberdayaan masyarakat berbasis desa ini seringkali memiliki resiko yakni motivasi wirausaha mustahik yang rendah dan ketidakmampuan dalam memmanage usaha yang dikembangkan [23] [24]. Didalam Surat At – taubah ayat 60 telah Allah SWT juga telah mengatur mengenai penerima (ashnaf) zakat yakni sebanyak delapan golongan sehingga penyaluran program zakat harus dilakukan secara tepat sasaran [25]. Sehingga untuk mempermudah amil dalam menentukan desa yang layak diberdayakan maka Pusat Kajian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menciptakan alat ukur yang dapat digunakan untuk menentukan penerima bantuan program pemberdayaan yakni Indeks Desa Zakat.

Dalam menyikapi problematika hal tersebut maka indeks desa zakat diciptakan sebagai alat ukur yang dapat digunakan dalam mengukur implementasi program zakat community development yang dalam hal ini program kampung zakat. Dalam alat ukur ini mempunyai lima unsur dimensi meliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan kemanusiaan serta dakwah [26] [27]. Indeks desa zakat diciptakan untuk menjadi acuan bagi organisasi pengelola program zakat berbasis pemberdayaan desa atau organisasi pengelola zakat dalam melaksanakan program pemberdayaan berbasis desa atau dalam hal lain zakat community development partner [28] [15]. Dalam perumusannya indeks desa zakat dirumuskan pertama kali pada tahun 2017 yang dirumuskan kembali pada tahun 2020. Pada perumusan ini menghasilkan lima dimensi dimana dari masing – masing dimensi diturunkan sebanyak 15 variabel dan 39 indikator bobot kontribusinya [29]. Disisi lain indeks desa zakat tidak hanya sebagai alat ukur dalam implementasi zakat community development tetapi juga merupakan bagian dari proses untuk mencapai output kinerja zakat yang merupakan bentuk refleksi dari indeks zakat nasional (IZN) [30]. Sebagai instrument yang bersifat proses adanya indeks desa zakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas program penyaluran zakat sehingga akan berdampak pada peningkatan nilai indeks zakat nasional [31]. Sehingga pada akhirnya dengan adanya indeks desa zakat diharapkan dapat diperoleh data yang valid dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan penyaluran program pemberdayaan yang tepat bagi komunitas mustahik.

Dampak kebermanfaatannya luas dengan adanya indeks desa zakat akan memberikan pengaruh besar bagi pengelolaan zakat di Indonesia khususnya pengelolaan zakat ditingkat Kota maupun Kabupaten [32] [12]. Akan tetapi dalam implementasi pengukuran indeks desa zakat ada beberapa problematika yang perlu menjadi perhatian khusus bagi BAZNAS kota ataupun kabupaten yakni pentingnya menyiapkan sumber daya manusia dalam hal menjalankan peran dalam indeks desa zakat. Sumber daya manusia perlu menjadi perhatian khusus dikarenakan merekalah yang nantinya menjalankan peran utama dalam melaksanakan program zakat. Selain problematika internal yang saat ini dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia terbatasnya sumber daya manusia akan berdampak sekali pada ruang gerak lembaga dalam menjalankan program zakat [33]. Terbatasnya sumber daya manusia tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa factor. Misalnya pandangan masyarakat Indonesia terhadap profesi amil yang masih dipandang sebelah mata. Faktor inilah yang nantinya akan menyulitkan organisasi pengelola zakat dalam merekrut sumber daya manusia atau amil yang professional. Sehingga dampak yang signifikan akan terjadi adalah pengelolaan zakat tidak dapat dilakukan secara maksimal [34]. Problematika permasalahan sumber daya manusia ini dapat dikatakan merupakan problem yang kompleks dimana selain dihadapkan pada terbatasnya sumber daya manusia juga dihadapkan pada permasalahan lain yakni kompetensi dari amil itu sendiri [35]. Kompetensi amil juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan dalam pengelolaan zakat dikarenakan berhasil atau tidaknya suatu program sangat dipengaruhi oleh kompetensi dari amil atau sumber daya manusia itu sendiri [36]. Sehingga permasalahan yang kerap terjadi pada saat ini adalah program dari LPZ tidak berjalan secara maksimal dikarenakan kompetensi amil tidak sesuai dengan program yang dijalankan [37].

Menyikapi permasalahan ketersediaan sumber daya manusia pada pengelolaan zakat di Indonesia Baznas Indonesia berupaya penuh dalam meningkatkan sumberdaya manusia baik dalam hal ketersediaan maupun kompetensi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional tahun 2020 – 2025 dimana dalam rencana tersebut upaya perbaikan salah satunya adalah dengan memperbanyak cadangan sumber daya amil zakat yang siap dalam membangun pengelolaan zakat di Indonesia secara berkelanjutan [38]. Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi amil saat ini telah dilaksanakan baik pada tingkatan BAZNAS pusat hingga BAZNAS ditingkat daerah kabupaten kota dan diimplementasikan sesuai standard operasional procedure (SOP) pada BAZNAS pusat [39]. Sebagai contoh adalah pada tahun 2018 Pusat Kajian Strategis BAZNAS melakukan pelatihan implementasi Indeks Zakat Nasional dan Indeks Desa Zakat. Dimana dalam pelatihan ini dihadiri oleh 75 utusan pengurus BAZNAS dari masing – masing provinsi yang berada di Pulau Sumatera [40]. Tidak hanya itu dalam hal meningkatkan kompetensi para amil di Indonesia BAZNAS juga telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS. Lembaga sertifikasi ini didirikan dengan berdasar pada Surat Keputusan Ketua BAZNAS No.178 Tahun 2017 mengenai pembentukan lembaga sertifikasi profesi Badan Amil Zakat Nasional dimana salah satu fungsi dan tugasnya adalah menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi [41]. Upaya ini merupakan bukti bahwa BAZNAS sangat konsen dalam memperhatikan kompetensi para amil. Selain itu peningkatan kompetensi para amil perlu menjadi perhatian khusus dikarenakan peran amil dalam indeks desa zakat juga sangat kompleks.

Dalam indeks desa zakat peran amil atau BAZNAS terbagi menjadi dua yakni sebagai intervensi dan advokasi [29]. Dalam menjalankan dua peran tersebut maka dibutuhkan keterampilan khusus dan kompetensi yang cukup agar amil BAZNAS dapat menjalankan perannya dalam indeks desa zakat.

Berdasarkan pemamaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka fokus riset ini adalah untuk menganalisa bagaimana strategi keberhasilan implementasi indeks desa zakat melalui perancangan sumber daya manusia dalam hal ini pada program kampung zakat di Kabupaten Sidoarjo. Faktor yang melatarbelakangi riset ini dilakukan adalah dikarenakan riset sebelumnya hanya berfokus mengenai implementasi pengukuran indeks desa zakat pada desa di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai contoh riset yang dilakukan oleh Wildhan Mukhammad dan Tony Seno Aji dimana dalam risetnya cenderung berfokus pada pengukuran indeks desa zakat pada Desa Panambangan Kabupaten Sidoarjo [4]. Selain itu pada riset kedua yang berjudul Kerjasama pemerintah desa dan kampung zakat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia hanya cenderung berfokus kepada model kerjasama antara pemerintah dan stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kampung zakat melalui program entrepreneurship [42]. Berbeda dengan riset sebelumnya fokus riset kali ini adalah mengkaji mengenai perancangan sumber daya manusia dalam hal ini amil pada program kampung zakat di Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan indeks desa zakat. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menciptakan strategi perancangan sumber daya manusia pada program kampung zakat di Kabupaten Sidoarjo dalam hal implementasi indeks desa zakat. Sehingga pada akhirnya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengurus kampung zakat yang terdapat di Indonesia yang mengalami keterbatasan sumber daya manusia dalam implementasi indeks desa zakat. Batasan dalam penelitian ini masih terbatas pada tujuan penelitian yang hanya meneliti terkait sumber daya manusia dan perancangan sumber daya dalam implementasi indeks desa zakat ditengah problematika terbatasnya sumber daya manusia. Sehingga saran selanjutnya untuk penelitian berikutnya dapat mengkaji misalnya mengenai sisi intellectual capital pengurus kampung zakat sehingga kajian ini dapat terus berlanjut.

II. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif intepretatif dengan alasan bahwa dalam penelitian ini peneliti banyak melakukan interpretasi dari beberapa pendapat informan mengenai bagaimana merancang sumber daya manusia pada program kampung zakat Kabupaten Sidoarjo dalam hal implementasi indeks desa zakat. Adapun pengertian metode kualitatif sendiri menurut Sugiyono diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti pada kondisi obyek yang bersifat alami dimana hasil penelitian lebih ditekankan pada makna yang diteliti daripada menggeneralisasikan obyek penelitian [43]. Sedangkan kualitatif intepretatif merupakan jenis penelitian yang memfokuskan pada sifat subjektif dari dunia sosial dan berusaha untuk memahami mengenai objek penelitian yang sedang dipelajari. Data – data dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti adalah data kualitatif yang berbentuk ucapan ataupun kata – kata yang selanjutnya data tersebut akan dikelola menjadi data yang dapat digunakan dalam menjawab penelitian yang sedang diangkat. Lokasi dalam penelitian ini berlokasi pada Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sebagai pusat administrasi program kampung zakat Kabupaten Sidoarjo. Informan penelitian ini dipilih dengan menggunakan Teknik purposive sampling dimana informan yang dipilih merupakan informan yang dianggap mengerti mengenai tema yang sedang diangkat. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui proses cara wawancara, focus group discussion dan dokumentasi kepada pengurus program kampung zakat Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, focus grup discussion dan dokumentasi yakni sebagai berikut:



Gambar 2. Teknik Pengumpulan Data

Sumber : Peneliti

Wawancara mendalam pada penelitian ini dilakukan dengan Sekretaris dan Seksi pendidikan SDM dan pendistribusian program kampung zakat Kabupaten Sidoarjo. Wawancara ini dilakukan sebanyak dua kali pertama dengan sekretaris program kampung zakat bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep kampung zakat, struktur

kepengurusan dan wawancara kedua dilakukan dengan Seksi Pendidikan SDM dan pendistribusian dengan tujuan untuk mengetahui mengenai gambaran sumber daya manusia yang terlibat didalam kampung zakat dan pemahaman akan indeks desa zakat. Focus group discussion dalam penelitian ini berfungsi untuk mendengar saran dari para ahli mengenai strategi implementasi indeks desa zakat pada program kampung zakat dan upaya peningkatan kompetensi para pengurus kampung zakat Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan pada saat proses pengumpulan data menggunakan teknik perekaman suara informan melalui audio visual. Dimana proses selanjutnya yang akan dilakukan proses verbatim. Hasil dari proses verbatim tersebut menghasilkan data berupa naskah percakapan penelitian. Dari naskah ini selanjutnya dapat diambil data data yang diperlukan pada penelitian yang sedang diangkat.

III. PEMBAHASAN

Problematika Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Program Kampung Zakat Kabupaten Sidoarjo

Indeks desa zakat merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan dan diimplementasikan oleh amil dalam melaksanakan program zakat community development. Dalam alat ukur ini terdapat lima dimensi yang meliputi dimensi ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, sosial dan kemanusiaan dan yang terakhir adalah dakwah. Tidak hanya melakukan pengukuran saja dalam indeks desa zakat amil zakat juga mempunyai tanggung jawab yakni melaksanakan dua peran dalam indeks desa zakat. Peran pertama adalah peran intervensi dimana dalam peran ini para pengurus kampung zakat atau program zakat community development partner mempunyai peran dalam memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat desa yang diberdayakan. Dalam peran terdapat tiga dimensi yang dapat diimplementasikan oleh pengurus kampung zakat yakni dimensi ekonomi, Kesehatan dan dakwah advokasi. Dalam setiap dimensi peran ini nantinya akan terbagi kedalam beberapa indikator dimensi. Peran kedua yang harus dilaksanakan dalam indeks desa zakat adalah peran advokasi dimana dalam peran ini pengurus kampung zakat mempunyai peran dalam menjalankan fungsi komunikasi kepada pemerintah mengenai kebutuhan – kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diharapkan dari adanya peran advokasi ini kebutuhan – kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah sehingga pemerintah mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dalam mensejahterakan masyarakat. Adapun dimensi yang terdapat dalam peran advokasi terbagi menjadi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan dan dakwah advokasi. Selain itu menjalankan dua peran tersebut para amil zakat juga harus menjalankan fungsi pengukuran dan penilaian. Akan tetapi pada pelaksanaan program kampung zakat masih terdapat permasalahan sehingga implementasi indeks desa zakat belum terlaksana secara maksimal. Permasalahan tersebut diantaranya terdiri dari terbatasnya sumber daya manusia, kompetensi pengurus terhadap indeks desa zakat dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan.



Gambar 3. Permasalahan Dalam Implementasi Indeks Desa Zakat

Sumber : Peneliti

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Permasalahan pertama dalam implementasi indeks desa zakat pada program kampung zakat adalah terkait keterbatasan pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah para pengurus kampung zakat. Peran sumber daya manusia dalam pengukuran ini memegang peran kunci dimana dalam implementasi indeks desa zakat dibutuhkan sumber daya yang dapat menerapkan konsep indeks desa zakat sehingga konsep ini dapat dijalankan secara maksimal. Dalam implementasi indeks desa zakat terdapat tiga peran meliputi peran pelaksanaan pengukuran dan penentuan dalam implementasi indeks desa zakat kedua adalah peran intervensi dan selanjutnya adalah peran advokasi. Ketiga peran ini harus

dilaksanakan oleh para pengurus kampung zakat sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak. Sumber daya manusia ini merupakan masalah utama yang saat ini dihadapi oleh pengurus kampung zakat khususnya dalam implementasi indeks desa zakat. Saat ini jumlah pengurus kampung zakat masih terbatas yakni berjumlah 13 orang saja. Tentunya dengan sumber daya manusia yang hanya 13 orang saja maka implementasi indeks desa zakat akan sulit dilakukan secara maksimal. Diperlukan sumber daya manusia yang cukup yang dapat mengimplementasikan konsep indeks desa zakat terutama pada saat menjalankan tiga peran dalam konsep ini.

2. Kompetensi Pengurus

Kendala kedua adalah terkait kompetensi pengurus kampung zakat dalam implementasi indeks desa zakat. Kompetensi ini dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama pengurus kampung zakat masih belum mengetahui mengenai konsep indeks desa zakat hal ini dikarenakan kurangnya literasi terkait konsep indeks desa zakat. Para pengurus kampung zakat sepenuhnya belum mengetahui mengenai konsep indeks desa zakat hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait konsep indeks desa zakat dari BAZNAS pusat kepada para pengurus kampung zakat. Selain itu apabila konsep indeks desa zakat ini diterapkan pada kampung zakat maka mereka juga memerlukan petunjuk teknis dalam implementasi indeks desa zakat sehingga dapat mudah diterapkan pada program kampung zakat. Aspek kedua terkait kompetensi yakni tingkat Pendidikan para pengurus kampung zakat dimana tingkat pendidikan ini sangat mendukung dalam implementasi konsep indeks desa zakat. Tingkat pendidikan juga akan berpengaruh terhadap pemahaman pengurus kampung zakat terhadap konsep implementasi indeks desa zakat. Tingkat pendidikan para pengurus kampung zakat di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan cukup baik. Latar belakang pendidikan para pengurus kampung zakat terdiri dari tingkat pendidikan S1 sampai S2. Dari total 13 sumber daya manusia yang terlibat dalam program kampung zakat sebanyak 8 pengurus mempunyai tingkat pendidikan S1 dan 5 pengurus mempunyai tingkat pendidikan S2. Meskipun tingkat pendidikan para pengurus kampung zakat cukup tinggi akan tetapi keilmuan para pengurus tidak sesuai dengan pekerjaan saat ini.

3. Beban Kerja

Kendala terakhir dalam implementasi indeks desa zakat adalah overload pekerjaan dalam hal ini adalah para pengurus kampung zakat mempunyai pekerjaan lain selain pada program kampung zakat. Pada dasarnya program kampung zakat ini merupakan program Kerjasama antara kementerian agama, Baznas dan Lembaga Amil Zakat sehingga para pengurus kampung zakat diambil dari pengurus kementerian agama, badan amil zakat nasional dan Lembaga Amil Zakat. Selain mempunyai tanggung jawab pada program kampung zakat para pengurus program kampung zakat juga mempunyai tanggung jawab utama yakni menjalankan pekerjaan asal institusi tempat mereka bekerja. Kesibukan pekerjaan yang berasal dari tempat kerja menjadikan kendala sendiri bagi terlaksananya program kampung zakat. Hal inilah yang menyebabkan program kampung zakat tidak dapat dijalankan secara maksimal dikarenakan adanya overload pekerjaan.

Perancangan Sumber Daya Manusia Pada Implementasi Indeks Desa Zakat

Dalam menyikapi permasalahan terbatasnya sumber daya manusia dan kompetensi dalam implementasi indeks desa zaka pada program kampung zakat maka diperlukan Kerjasama dengan pihak eksternal. Tujuan Kerjasama ini agar implementasi indeks desa zakat ini dapat dijalankan secara maksimal. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan merancang konsep sumber daya manusia pada antar lembaga eksternal yang linier dengan program kampung zakat. Lembaga ini akan berfungsi sebagai support sumber daya manusia dalam implementasi indeks desa zakat. Langkah awal dalam implementasi solusi ini adalah menjalin kerjasama dengan para stakeholder terkait semisal dengan Badan Pusat Statistik (BPS) atau Universitas. Dalam gambar 4 akan dijelaskan mengenai konsep implementasi indeks desa zakat dan peran – peran sumber daya dalam implementasi indeks desa zakat pada program kampung zakat.



Gambar 4. Konsep Perancangan Sumber Daya Manusia
Sumber : Peneliti

Adapun pihak stakeholder yang dapat dijadikan sebagai mitra dalam implementasi indeks desa zakat agar dapat berjalan maksimal diantaranya adalah Badan Pusat Statistik dan para Akademisi. Kedua stakeholder ini dapat mengugaskan sumber daya manusia mereka dalam tahapan pengukuran dan penetapan desa yang layak dibantu dengan konsep indeks desa zakat. Kerjasama ini diperlukan mengingat kompetensi pengurus kampung zakat dinilai masih belum bisa dalam menerapkan pengukuran indeks desa zakat. Badan Pusat Statistik dan Akademisi Universitas dapat dibantu dengan pihak pemerintah desa selaku pihak yang memberikan data – data terkait kesejahteraan desa dalam menentukan desa yang layak untuk diberdayakan pada program kampung zakat dengan menggunakan pengukuran indeks desa zakat. Setelah dilakukan penentuan desa yang akan diberdayakan pada program kampung zakat selanjutnya pihak pengurus kampung zakat dapat melakukan peran intervensi dengan membentuk beberapa program pemberdayaan meliputi lima program utama yakni ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemasusiaan, dakwah dengan menyesuaikan dengan dilapangan. Peran intervensi selama ini sudah dijalankan oleh pengurus kampung zakat dengan melakukan pemberian bantuan renovasi bedah rumah dan bantuan pendidikan al – quran. Peran intervensi cenderung dapat mudah diterapkan oleh pengurus kampung zakat karena mereka memiliki kompetensi dalam bidang penyaluran dana zakat. Dalam peran advokasi para pengurus program kampung zakat dapat melibatkan kementerian agama yang masuk kedalam struktur kepengurusan dan sebagai wakil pemerintah untuk menjembatani segala kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Upaya peran advokasi ini saat ini sudah mulai diimplementasikan oleh pengurus kampung zakat kabupaten sidoarjo dengan menjembatani perusahaan sekitar desa yang diberdayakan dalam penyaluran program CSR.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Pengurus Kampung Zakat

Setelah dilakukan pemetaan sumber daya manusia beserta tugas yang harus dijalankan maka Langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan terkait pengembangan sumber daya manusia pada pengurus program kampung zakat. Pengembangan sumber daya dinilai penting dikarenakan tujuan dari pengembangan karyawan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan skill dari sumber daya manusia yang terdapat di program kampung zakat. Terkait pengembangan sumber daya manusia terdapat beberapa hal dibawah ini yang dapat di implementasikan dalam proses pengembangan sumber daya manusia diantaranya meliputi kompetensi, analisa beban kerja, dan peran pemimpin dalam memfasilitasi sumber daya manusia yang ada di program kampung zakat:

1. Kompetensi

Pengembangan sumber daya manusia pada implementasi indeks desa zakat dapat melalui cara pengembangan kompetensi dari para pengurus kampung zakat. Pada pengembangan kompetensi ini hal yang harus menjadi fokus tujuan adalah bagaimana caranya seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi indeks desa zakat pada program kampung zakat dapat mengerti dan memahami mengenai implementasi indeks desa zakat. Hal ini bertujuan agar seluruh sumber daya manusia yang terdapat pada program kampung zakat dapat mengimplementasikan indeks desa zakat yang baik dan sesuai dengan program kampung zakat yang akan diimplementasikan. Terdapat beberapa cara terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang terdapat pada program kampung zakat diantaranya adalah :

- Membuat program peningkatan kompetensi melalui program pelatihan indeks desa zakat kepada seluruh sumber daya manusia yang terlibat didalam program ini. Adapun program pelatihan dapat dilakukan selama dua bulan sekali dengan melibatkan para pengurus kampung zakat. Tema terkait pelatihan dapat berupa tema – tema terkait indeks desa zakat. Program pelatihan indeks desa zakat pada program kampung zakat terdapat pada gambar berikut.

PROGRAM PELATIHAN INDEKS DESA ZAKAT
TAHUN 2023

No	Peserta	Nama Pelatihan	Penyelenggara / Instruktur	Waktu												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pengurus Kampung Zakat & Pemerintah Desa	Sosialisasi Indeks Desa Zakat	BAZNAS Pusat					v								
2	BPS, Akademisi, Pengurus Kampung Zakat	Format pengukuran Indeks Desa Zakat	BAZNAS Pusat							v						
3	Pengurus Kampung Zakat	Format program pemberdayaan masyarakat	BAZNAS Pusat											v		
4	Pengurus Kampung Zakat	Sosialisasi peran pengurus kampung zakat Kabupaten Sidoarjo	BAZNAS Pusat													v

Gambar 5. Program Pelatihan Indeks Desa Zakat

Sumber : Peneliti

- Membuat kerangka evaluasi pelatihan baik setelah pelatihan maupun pada saat implementasi indeks desa zakat. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan setahun sebanyak dua kali dan dapat dilakukan rapat tinjauan manajemen untuk membahas terkait solusi terkait temuan – temuan pada saat proses evaluasi. Pada kerangka evaluasi pihak pengurus kampung zakat harus membuat tabel skor kategoris untuk menilai apakah pengurus sudah kompeten dalam memahami serta melaksanakan indeks desa zakat.
 - Membuat kerangka penilaian sumber daya manusia dalam hal ini amil dalam program implementasi indeks desa zakat dan program kampung zakat.
2. Evaluasi Beban Kerja
- Analisa beban kerja perlu dilakukan mengingat sumber daya manusia yang terlibat didalam program ini berasal dari berbagai Lembaga seperti Badan Pusat Statistik, Akademisi, Kemenag, Baznas dan LPZ. Tujuan dilakukan evaluasi ini selain untuk memberikan pemetaan pekerjaan dari para pengurus kampung zakat. Terkait Analisa evaluasi beban kerja terdapat beberapa Langkah yang dapat diimplementasikan dalam meminimalkan beban kerja dari sumber daya manusia yang terlibat diantaranya sebagai berikut :
- Membuat ManPower Plan Sumber Daya Manusia yang terlibat pada implementasi indeks desa zakat.
 - Melakukan Analisa work life balance
 - Menentukan PIC dalam program kampung zakat
 - Membuat rancangan target dari setiap individu pada implementasi indeks desa zakat
 - Membuat rancangan evaluasi dari pimpinan
3. Peran Pemimpin Dalam Implementasi Program Kampung Zakat
- Peran pemimpin dalam implementasi indeks desa zakat pada program kampung zakat memegang peran kunci dalam mengembangkan sumber daya manusia yang terlibat pada program ini. Selain itu seorang pemimpin harus dapat memfasilitasi sumber daya manusia yang ada pada program kampung zakat. Hal ini bertujuan agar sumber daya manusia didalam program ini dapat menerapkan seluruh keterampilannya didalam implementasi sumber daya manusia yang terdapat pada program kampung zakat. Dibawah ini akan dijelaskan peranan penting pemimpin dalam pengembangan sumber daya manusia:
- Pemimpin harus dapat mengidentifikasi seluruh kebutuhan yang relevan dengan implementasi indeks desa zakat.
 - Pemimpin pada program kampung zakat dapat memfasilitasi segala informasi yang berkaitan dengan efektifitas penerapan implementasi indeks desa zakat yang terdapat pada program kampung zakat.
 - Pemimpin kampung zakat harus dapat menentukan cara penanganan karyawan agar dapat memberikan kontribusi terhadap efektifitas implementasi indeks desa zakat.
 - Pemimpin program kampung zakat harus dapat memfasilitasi segala kebutuhan operasional yang relevan untuk mencapai kesesuaian pada implementasi indeks desa zakat pada program kampung zakat.

Kesimpulan

Indeks desa zakat merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan dan diimplementasikan oleh amil dalam melaksanakan program zakat community development. Konsep ini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pengurus kampung zakat kabupaten sidoarjo. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya adalah terbatasnya sumber daya manusia, kompetensi yang tidak mendukung dan beban kerja yang tinggi. Oleh karenanya diperlukan kerjasama antar stakeholder agar konsep ini dapat sepenuhnya dijalankan. Kerjasama ini dapat melibatkan Badan Pusat Statistik dan para akademisi universitas sebagai support sumber daya manusia dan bertujuan untuk melibatkan Lembaga ini dalam proses pengukuran dan penilaian desa yang layak dibantu. Selanjutnya dalam implementasi peran intervensi dapat dilakukan oleh pengurus kampung zakat sendiri mengingat kompetensi mereka yang dapat digunakan dalam menunjang peranan intervensi ini. Peran terakhir adalah peran advokasi dimana dalam peran ini dapat diwakilkan oleh kementerian agama sebagai wakil pemerintah dalam menjembatani kebutuhan – kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya itu dalam pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung implementasi indeks desa zakat diantaranya peningkatan kompetensi, evaluasi beban kerja dan peran pemimpin didalam implementasi indeks desa zakat.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah pertama implementasi kampung zakat sedianya berfokus pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk menjadikan ekonomi dari para mustahiq dapat meningkat dan dapat meningkatkan status mereka dari mustahiq menjadi muzakki. Program pemberdayaan ini dapat melalui pengembangan umkm para mustahiq. Saran selanjutnya dalam program ini diharapkan dapat mengimplementasikan indeks desa zakat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penentuan desa yang layak dibantu.

REFERENSI

- [1] E. Nurhasanah, "Feasibility Study Program Zakat Community Development Studi Kasus: Desa Mekarsari, Kabupaten Garut," *Islam. J. Ekon. Islam*, Vol. 10, No. 2, 2019, Doi: 10.32678/Ijei.V10i2.146.
- [2] F. F. Ramadhan, "Pengukuran Indeks Desa Zakat (Studi Di Desa Mandiraja Wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah)," 2019.
- [3] A. Jamil, "Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan," *J. Ekon. Dan Perbank. Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- [4] W. M. S. Aji, "Indeks Desa Zakat Pada Desa Penambangan Kabupaten Sidoarjo 2015–2018," *Ziswaf J. Zakat Dan Wakaf*, Vol. 7, No. 2, Pp. 166–186, 2020, Doi: 10.21043/Ziswaf.V7i2.7707.
- [5] A. S. F. H. Zaenal, "Pembangunan Desa Berbasis Kemaslahatan Dalam Kerangka Indeks Desa Zakat," *J. Syarikah*, Vol. 5, No. 2, Pp. 156–172, 2019.
- [6] I. Pitriyanti, "Implementasi Idz (Indeks Desa Zakat) Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu," *Hum. Falah J. Ekon. Dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 1, Pp. 83–97, 2021.
- [7] M. G. G. Pratama, I. Zahara, And N. Hasanah, "Meningkatkan Potensi Ekonomi Dengan Produk Unggulan Kelompok Wanita Tani Dan Identifikasi Indeks Desa Zakat Di Desa Harkuning," *J. Pus. Inov. Masy.*, Vol. 2, No. 3, Pp. 465–469, 2020.
- [8] Tatang Ruhiat, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di Lazismu)," *Malia J. Ekon. Islam*, Vol. 11, No. 2, Pp. 277–288, 2020, Doi: 10.35891/ML.V11i2.1873.
- [9] N. Susilawati, "Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lembaga Zakat," *J. Al-Intaj*, Vol. 4, No. 1, Pp. 105–124, 2018, Doi: 10.1016/J.Worlddev.2018.08.012.
- [10] F. A. R. A. V. Machdun, "Sumber Daya Manusia Dan Problematika Pengelolaan Zakat Secara Produktif Oleh Baitul Mal Aceh," *J. Ilm. Manaj. Bisnis Dan Inov.*, Vol. 9, No. 3, Pp. 1534–1543, 2022.
- [11] I. H. S. N. Saragih, "Implementasi Desa Zakat Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara Dengan Pendekatan Indeks Desa Zakat 2.0," *J. Ilm. Ekon. Islam*, Vol. 8, No. 02, Pp. 1998–2009, 2022.
- [12] R. W. P. F. Cahyono, "Pengukuran Indeks Zakat Mendukung Program Zakat Community Development Di Desa Sumobito," *J. Ekon. Syariah Teor. Dan Terap.*, Vol. 7, No. 4, Pp. 668–686, 2020, Doi: 10.20473/Vol7iss20204pp668-686.
- [13] S. F. M. Hernawati, "Community Social Empowerment In Zakat Community Development (Zcd)," *Mimb. J. Sos. Dan Pembang.*, Vol. 35, No. 2, Pp. 460–470, 2019, Doi: 10.29313/Mimbar.V35i2.5127.
- [14] S. M. Rahmatullah, "The Implementation Of Indeks Desa Zakat (Idz) For Priority Areas Of The Zakat Community Development (Zcd) Program For The Empowerment Of Productive Mustahiq In South Kalimantan," *Int. J. Zakat*, Vol. 3, No. 3, Pp. 83–99, 2018, Doi: 10.37706/Ijaz.V3i3.99.
- [15] F. N. M. Ali, "Implementation Of The Zakat Village Index To Support A Zakat Community Development Program In Bedono Village, Demak District," *Int. J. Zakat*, Vol. 3, No. 3, Pp. 25–38, 2018, Doi: 10.37706/Ijaz.V3i3.93.
- [16] R. Sumantri, "Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest," *I-Economics A Res. J. Islam. Econ.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 209–234, 2017, Doi: 10.19109/Ieconomics.V3i2.1688.
- [17] V. T. Putriana, "Effectiveness Of Zakat Community Development Program: A Case Study In West Sumatera," *J. Islam. Financ.*, Vol. 10, No. 2, Pp. 1–17, 2021.
- [18] D. Firstiana, "Analisis Indeks Kemiskinan Dengan Menggunakan Pendekatan Fgt Index Sesudah Program Ikhtiar (Studi Kasus : Program Ikhtiar Masyarakat Mandiri Di Desa Tegal Dan Desa Babakan Sabrang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor)," *Media Ekon.*, Vol. 20, No. 1, 2017, Doi: 10.25105/Me.V20i1.777.
- [19] Mahfiyah, "Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama (Studi Kasus Jember)," *Indones. J. Islam. Econ. Financ.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 45–51, 2019.
- [20] D. P. S. A. Dzulfikar, "Peningkatan Ekonomi Mustahik Zakat Melalui Program Zakat Community Development (Zcd) (Studi Kasus Di Desa Sulung , Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)," *Al-Fiqh J. Islam. Stud.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 37–44, 2023.
- [21] N. Widiastuti, "Penghitungan Efektivitas Pemberdayaan Desa Menggunakan Indeks Desa Zakat (Idz) (Studi Kasus: Desa Laharpang Kediri)," *J. Ekon. Syariah Teor. Dan Terap.*, Vol. 6, No. 7, Pp. 1421–1433, 2019.
- [22] Halimatussakdiyah&Nulaily, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov.Sumut)," *At-Tawassuth J. Ekon. Islam*, Vol. 26, No. 2, Pp. 173–180, 2021, [Online]. Available: [Http://www.Ufrgs.Br/Actavet/31-1/Artigo552.Pdf](http://www.Ufrgs.Br/Actavet/31-1/Artigo552.Pdf)

- [23] R. Hidajat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar," *J. Stud. Agama*, Vol. 17, No. 1, Pp. 63–84, 2017, Doi: 10.20885/Millah.Vol17.Iss1.Art4.
- [24] R. T. P. Ningrum, "Penerapan Manajemen Zakat Dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun)," *J. Stud. Agama*, Vol. 4, No. 1, Pp. 1–22, 2016.
- [25] M. I. Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (Laz) Ummat Sejahtera Ponorogo," *J. Stud. Islam Dan Sos.*, Vol. 2, No. C, Pp. 106–112, 2021, [Online]. Available: <https://Lisyabab-Staimas.E-Journal.Id/Lisyabab>
- [26] T. W. N. Rahmatika&Ashlihah, "Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang," *Filantr. J. Manaj. Zakat Dan Wakaf*, Vol. 1, No. 2, Pp. 177–192, 2020, Doi: 10.22515/Finalmazawa.V1i2.2810.
- [27] E. D. Lestari&Tikawati, "Analisis Peran Program Zakat Community Development Baznas Kota Samarinda Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Samarinda," *Al-Tijary*, Vol. 5, No. 1, Pp. 59–73, 2019, Doi: 10.21093/At.V5i1.1303.
- [28] W. P. S. B. P. Harto, "Measurement Of The Zakat Village Index In Curug Depok," *Li Falah J. Stud. Ekon. Dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 2, Pp. 54–65, 2022, Doi: 10.31332/Lifalah.V6i2.2700.
- [29] P. K. S. B. A. Z. Nasional, *Indeks Desa Zakat 2.0*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), 2020.
- [30] D. Lubis, D. B. Hakim, And Y. H. Putri, "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," *Jebi (Jurnal Ekon. Dan Bisnis Islam.*, Vol. 3, No. 23, 2018.
- [31] M. Marya, "Implementasi Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program Zakat Community Development (Studi Kasus Pada Nagari Andaleh, Kec. Batipuh Kabupaten Tanah Datar)," Iain Batusangkar, 2020.
- [32] N. Susilawati, A. Sunarto, And Rohimin, "Zakat Community Development Program Through A Zakat Village Index Approach," *Madania*, Vol. 23, No. 2, Pp. 191–202, 2019.
- [33] S. R. Herlita, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan," *Alhadharah J. Ilmu Dakwah*, Vol. 18, No. 1, Pp. 13–26, 2019.
- [34] Y. Anggoro, T. N. Realita, Y. Anggoro, And R. A. Aditama, "Social Entrepreneurship, Career Choice And Religiosity: Ziswaf Institution Perspective," *J. Ilm. Ekon. Islam*, Vol. 7, No. 2, Pp. 595–604, 2021, Doi: 10.29040/Jiei.V7i2.2060.
- [35] B. Dikuraisyin, "Balanced Scorecard Analysis Of Amil Kompetensi Competence As A Model Rule For The Development Of Zakat Institutions Resources (Study At Laz Rumah Zakat Surabaya, East Java)," *El-Qist J. Islam. Econ. Bus.*, Vol. 11, No. 2, Pp. 164–181, 2021, Doi: 10.15642/Elqist.2021.11.2.164-181.
- [36] A. J. Musthofa, "Pengaruh Manajemen Zakat Produktif Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kesejahteraan," *J. Ekon. Dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 1, Pp. 1–12, 2019, [Online]. Available: <http://Journal.Stienugresik.Ac.Id/Index.Php/Jek/Article/View/27%0ahttp://Journal.Stienugresik.Ac.Id/Index.Php/Jek/Article/Download/27/19>
- [37] R. A. K. &Emylia Yuniartie, "Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (Imz)," *Akuntabilitas J. Penelit. Dan Pengemb. Akunt.*, Vol. 13, No. 1, Pp. 19–32, 2019, Doi: 10.29259/Ja.V13i1.9526.
- [38] B. A. Z. Nasional, *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021*. Indonesia: Badan Amil Zakat Nasional, 2021, Pp. 1–146. [Online]. Available: <https://Pid.Baznas.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2021/12/Renstra-Baznas-2020-2025.Pdf>
- [39] P. K. S. Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta, 2023.
- [40] B. Banyuasin, "Puskas Baznas Gelar Pelatihan Izn-Idz," *Baznas Banyuasin*, 2018. <https://Baznas.Banyuasinkab.Go.Id/Puskas-Baznas-Gelar-Pelatihan-Izn-Idz/>
- [41] B. A. Z. Nasional, *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 178 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Amil Zakat Nasional*. Indonesia, 2017, Pp. 1–2. [Online]. Available: <http://Www.Lsp.Baznas.Go.Id/Assets/Files/Sk Pembentukan Lsp.Pdf>
- [42] Hasiyah&Pidawati, "Kerjasama Pemerintah Desa Dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Al - Sulthaniyah J. Ilmu Syariah, Hukum, Polit. Pemerintah.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 1–12, 2021.
- [43] P. Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Edisi Revi. Yogyakarta: Cv. Alfabeta, 2020.

Uji plagiasi

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo
Student Paper

10%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On